PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Gatot Subroto Nomor 12 Nganjuk Kode Pos 64412
Telepon (0358) 323495 Faks (0358) 327183
e-mail : dprdnganjukkab@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada	:	Yth. 1. Pejabat Sub Koordinator 2. Staf Fungsional/ Staf Teknis
Dari	:	Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Tanggal	:	15 Oktober 2024
Nomor	:	005/0879/411.100/2024
Sifat	:	Penting
Perihal	:	Evaluasi Kinerja Bagian Program dan Keuangan Tribulan III

Sehubungan dengan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Khususnya pada Bagian Program dan Keuangan serta dalam bentuk Evaluasi kinerja Tribulan III Tahun 2024, maka dimohon Kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	16 Oktober 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Garuda Sekretariat DPRD
Pukul	:	09.00 WIB
Acara	:	Evaluasi Kinerja Bagian Program dan Keuangan Tribulan III Tahun 2024
Catatan	:	Untuk PNS sudah Menyusun dan Upload data Pengukuran Kinerja Tribulan III

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

an. Kepala Bagian Program dan Keuangan
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

SIGIT DWI PRASETIJO,SE
Penata Tingkat I
NIP.19700306 200604 1 004

DAFTAR HADIR RAPAT EVALUSI KINERJA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
TRI BULAN III TAHUN 2024

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Oktober 2024
Pukul : 09.00 wib
Tempat : Ruang Rapat Bapemperda Kabupaten Nganjuk
Acara : Evaluasi Kinerja Bagian Program dan Keuangan Tribulan III Tahun 2024

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SIGIT DWI PRASETIJO,SE	Analis Keuangan	1.
2.	Fredian Dwi P, STTP, M.AP	Perencana ahli	2.
3.	Suwawan	Staf	3.
4.	Alfian J	—II—	4.
5.	Johan N	—II—	5.
6.	Heri K	—II—	6.
7.	ULan Agus	—II—	7.
8.	Risa Widi	—II—	8.
9.	Rani Mindya K	—II—	9.

Nganjuk, 16 Oktober 2024
Analis Pusat dan daerah
Kabupaten Nganjuk

SIGIT DWI PRASETJO.SE
NIP. 19700306 200601 1 004

DOKUMENTASI
RAPAT EVALUASI KINERJA BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGANJUK
TRIBULAN III TAHUN 2024





NOTULEN RAPAT
EVALUASI INTERNAL TRIBULAN III
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	16 Oktober 2024
Tempat	:	Ruang Rapat Bapemperda Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk
Waktu	:	09.00 s/d Selesai
Pimpinan	:	Sub Bagian Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Anggota	:	1. Pejabat Sub Koordinator pada Bagian Program dan Keuangan 2. Staf pada Bagian Program dan Keuangan
Keterangan	:	Daftar Hadir Terlampir

Pak Sigit Dwi P :

- Membahas terkait ketepatan pencairan dana menjadi salah satu factor penting dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD Kab. Nganjuk dan Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk.
- Disiplin kerja sudah berjalan dengan baik berkat adanya absensi elektronik, tapi harus semakin ditingkatkan, karena disiplin kerja menjadi awal penentu kinerja.
- Terkait tupoksi di bagian perbendaharaan sudah berjalan dengan baik juga tapi juga harus di tingkatkan.

Pak Fredian Dwi P :

- Terkait kendala nanti mohon di buatkan laporan
- Dalam pekerjaan kita tidak dapat bekerja sendiri – sendiri karena kita adalah team yang membutuhkan kerjasama.
- Karena kendala SIPD yang sering gangguan maka sulitnya permintaan laporan LRA dan kebutuhan lainnya yang harus di ambil dari Aplikasi SIPD.
- Adanya laporan di Link Sukma saat ada nya survei terkait kecepatan dalam pencairan dana kegiatan dari pihak ke tiga.
- Mohon Pak Sigit untuk membuatkan SOP terkait pengajuan SPJ kegiatan, atau membuatkan alur terkait pengajuan SPJ itu karena yang menjadi catatan adalah pengerjaan pengecekan SPJ.
  Catatannya :
  1. Karena dinilai terlalu lama nya mencairkan
  2. Ketika SPJ saat di cek ada kesalahan dan dikembalikan ke yang mengajukan harap di buatkan tanda terima jadi tidak hanya menerima SPJ saja yang ada tanda terimanya tetapi saat mengembalikan juga diberikan tanda terima,
  3. Sebagai contoh saat SPJ di masukkan hari kamis kalau bias hari kami itu juga di koreksi jika ada kesalahan maka di hari jumat di kembalikan sehingga mteman-teman bias segera merevisi karena kondisi menyesuaikan Pak Sekwan (PA).
  4. Kontrol anggaran yang sudah dibuatkan NPD tetapi belum di TBP kan karena untuk mengurangi resiko anggaran yang belum atau sudah terrealisasi.
  5. Keterlambatan Laporan LRA dan EKinerja

Pak Sigit Dwi P :

- Menanggapi terkait alur SPJ yang dimasukkan ke Perbendaharaan, SPJ masuk di hari pertama jika tidak ada pekerjaan yang urgen lainnya kami akan langsung cek jika missal ada pekerjaan urgent kami cek di hari ke 2 jika di hari ke 2 tidak ada kendala maka akan langsung saya verifikasi dan langsung di bayarkan, sebaliknya jika ada kendala saat kami cek maka SPJ tersebut langsung kami kembalikan untuk direvisi jika revisi sudah selesai maka akan kami cek kembali jika memang sudah di benahi atau direvisi maka akan kami langsung bayar, dan terkait dengan pencairan kami sesuaikan dengan kegiatan urgent kami dahulukan untuk fasilitasi kegiatan Bpk dan Ibu Anggota DPRD Kab. Nganjuk.
- Terakit SOP atau alur pengajuan SPJ kami akan buatkan kedepannya.
- LRA,Fungsional dan semua laporan yang di ambil dari Aplikasi SIPD menjadi tanggung jawab kami di bagian perbendaharaan akan selalu kami usahakan maximal tanggal 10 di setiap bulannya entah nanti itu laporannya sudah tepat atau masih ada tambahannya karena terkait penginputan TBP di SIPD yang

sering gangguan.

- Dan terkait sering terlambatnya dalam pelaporan LRA,Fungsional dan laporan-laporan lain yang diambil dari Aplikasi SIPD itu di sebabkan karena Aplikasi SIPD yang susah di akses.

Pak Gunawan :

- Terkait kegiatan sehari – hari di bagian Perbendaharaan sudah berjalan dengan baik dan akan selalu kami usahakan untuk maximal.
- Terkait alur Pengajuan – Cek – Verifikasi – Pencairan mohon Pak Sigit untuk dibuatkan SOP nya.
- Permohonan penambahan personil dibagian Perbendaharaan karena Saya rencana akan diberikan tugas tambahan di bagian TU Komisi I.

Pak Fredian Dwi P :

- Mohon di perjelas Pak Sigit terkait pengajuan SPJ diajukan ke siapa dan siapa yang pertama kali menerima.
- Untuk pengecekan berikan pengajuan SPJ baikknya dilakukan oleh satu orang yang diberikan tanggung jawab.

Pak Sigit Dwi P :

- Untuk Pak Gun nanti menunggu terkat surat penugasan dari Pak Sekwan
- Untuk pengajuan SPJ makan dan minum di tugaskan ke Pak Gunawan.
- Untuk pengajuan SPJ diajukan ke saya selanjutnya kita proses diverifikasi secara Administrasi ke Mbak Rani dan Mbak Risa kalau ada perhitungan pajak.
- Kalau sudah valid kembali ke saya untuk dicairkan
- Untuk ASN Gunawan dan Alvian dapat juga memverifikasi SPJ langsung kalau sudah valid/betul dapat untuk langsung dicairkan.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah

SIGIT DWI PRASETJO, SE
19700306 200604 1004

Laporan Evaluasi Internal Tribulan III 2024
BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

Acara	:	Rapat Evaluasi Internal Tribulan III
Tempat	:	Ruang Rapat Bapemperda Sekretariat DPRD Kab. Nganjuk
Pukul	:	09.00 s/d Selesai
Pimpinan Rapat	:	Sigit Dwi Prasetijo, SE
Anggota Rapat	:	Fredian Dwi Priyanarka, S.STP, M.A.P
		Gunawan
		Alfian Junaidi
		Ulan Agus Madian
		Johan Novianta Putra
		Risa Widi Astutik
		Rani Nindya Kusumawardhani
		Heri Kurniawan

Realisasi Anggaran Tribulan III 2024

No.	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran 2024	Realisasi	Persentase
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Rp 121.615.250**	**Rp 80.518.00**	**66,21%**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 32.888.300	Rp 26.445.000	80,41%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 8.278.900	Rp 8.211.000	99,18%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 7.333.050	Rp 7.252.000	98,89%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rp 7.936.600	Rp -	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp 7.448.400	Rp -	0,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 28.097.100	Rp 12.040.000	42,85%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 29.632.900	Rp 26.570.000	89,66%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	**Rp 3.601.370.799**	**Rp 2.337.679.376**	**64,91%**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 3.485.615.799	Rp 2.270.197.976	65,13%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 30.080.800	Rp 12.211.200	40,59%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 63.889.200	Rp 35.204.200	55,10%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 6.914.900	Rp 6.896.000	99,72%

5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Rp 4.986.000	Rp 4.735.000	94,96%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 4.986.600	Rp 4.957.000	99,00%
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 4.897.500	Rp 3.498.000	71,42%
8	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Rp. 28.282.391.848	Rp. 20.854.887.795	73,73 %

Realisasi Kinerja Tribulan III 2024

No.	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Perencanaan, Penganggran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	40	80,00%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	2	66,67%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100,00%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	0	0,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	9	75,00%
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	9	75,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daearah	74	55	74,6%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	616	483	78,00%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	84	84,00%
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24	22	91,00%

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00%
5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	13	216%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	4	100,00%
7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	1	50,00%
8	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	716 orang/12 bulan	620	86,59%

Evaluasi Internal

1. Sub Bag Analis Keuangan Pusat dan Daerah
   - Dengan diterapkannya SOP terkait pengumpulan Berkas Pemindahbukuan dan Berkas SPJ Kegiatan
     maka dapat mengurangi resiko keterlambatan.
   - Dengan menerapkan disiplin kerja maka dapat memenuhi target kinerja dengan baik.
   - Mengatur Tupoksi kerja untuk ketepatan kinerja.

2. Sub Bag Perencana Ahli Muda
   - Terlambatnya dalam Penyususnan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Terdapat kesalahan dalam Prediksi untuk Belanja Tunjangan Transportasi untuk DPRD Kabupaten Nganjuk pada DPPA TA. 2024

Kendala :

1. Sub Bag Analis Keuangan Pusat dan Daerah
   - Seringnya terjadi gangguan pada Aplikasi SIPD Penatausahaan sehingga membuat kesulitan dalam penginputan baik NPD,TBP dan membuat laporan LRA,Fungsional.
   - Adanya Perubahan perlakuan Perjalanan Dinas DPRD dari Lump Sum menjadi At Cost.

2. Sub Bag Perencana Ahli Muda
   - Kurangnya Ketersediaan data Laporan Realissi Anggaran (LRA)
   - Kurangnya ketelitian dalam Penganggaran, serta terlambatnya Rekomendasi Pimpinan DPRD dari Partai.

Tindak Lanjut :

1. Sub Bag Analis Keuangan Pusat dan Daerah
   - Terkait Kendala gangguan SIPD dalam Penginputan NPD,TBP dan Penyusunan Laporan LRA, SPJ Fungsional, dari bagian Perbendaharaan telah melakuan Koordinasi ke BPKAD, dan dari BPKAD memberi jawaban bahwa memang untuk saat ini SIPD masih dalam pemeliharaan jaringan sistem SIPD jadi di mohon untuk tetap bersabar sampai menunggu pemeliharaan selesai. Aplikasi SIPD untuk sementara dapat diakses dengan sedikit maximal pada jam malam hari.

2. Sub Bag Perencana Ahli Muda
- Koordinasi dengan Perbendaharaan dalam Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Membuat Nota Dinas agar pada Awal Bulan/Akhir Bulan untuk dicetakkan Laporan Realisasi Anggran (LRA)
- Koordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD untuk melakukan Pergeseran antar Rincian Obyek Belanja dalam Sub Kegiatan

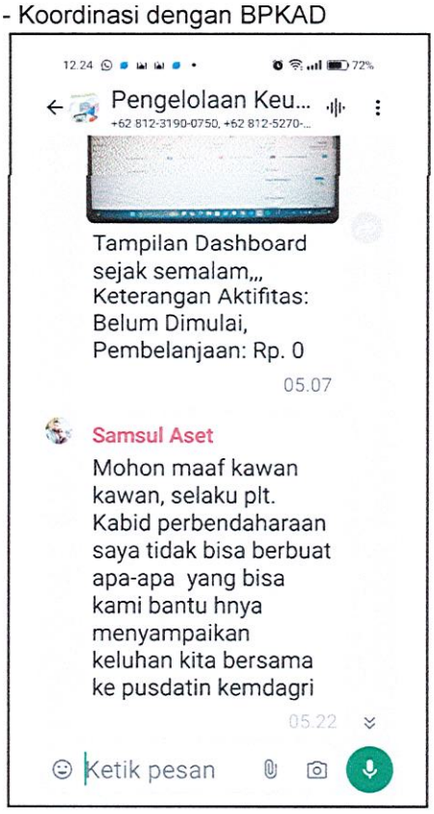
Analis Keuangan Pusat dan Daerah

SIGIT DWI PRASETJO, SE
19700306 200604 1004

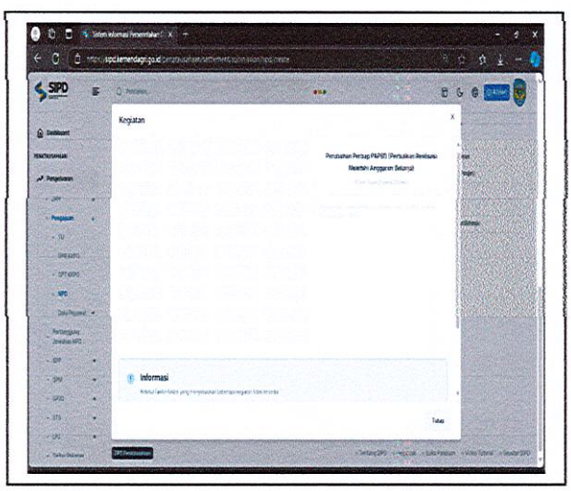
Bukti Tindak Lanjut

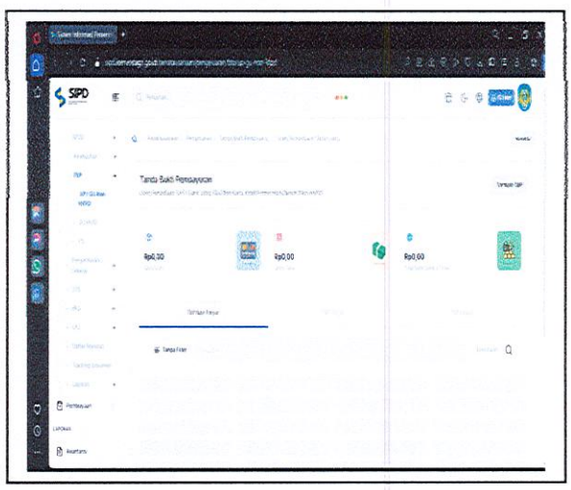
1. Sub Bag Analis Keuangan Pusat dan Daerah

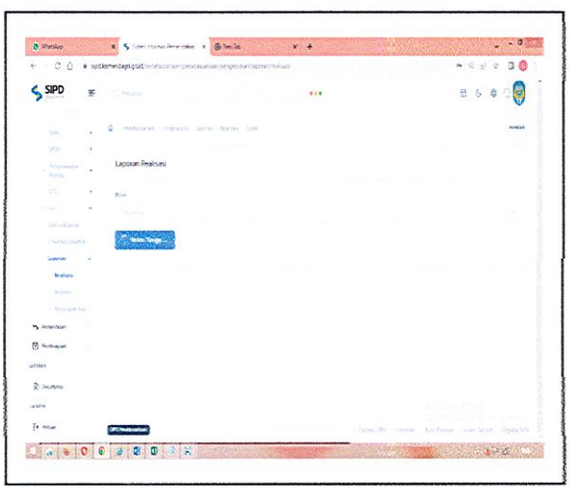
- Koordinasi dengan BPKAD

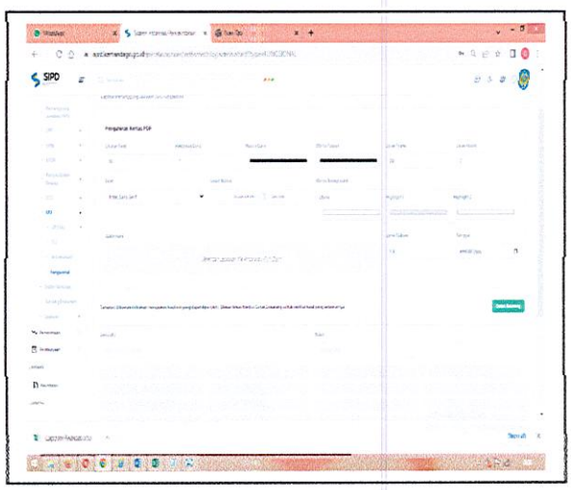


Gangguan Aplikasi SIPD saat proses NPD,TBP,LRA dan Fungsional

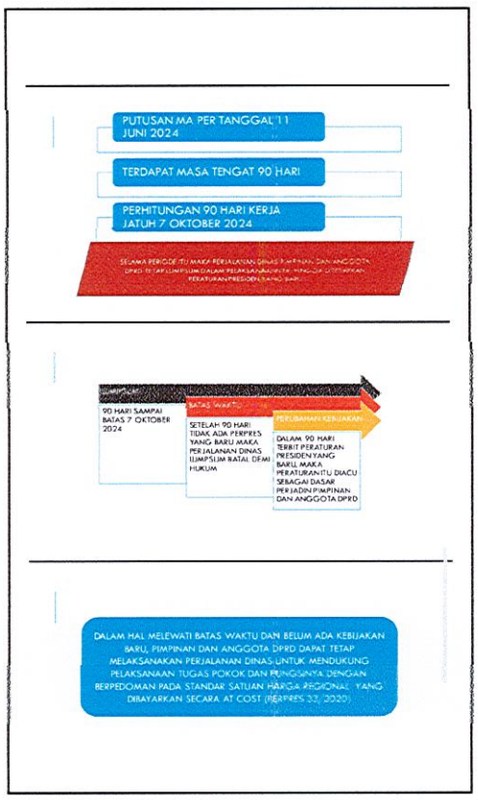








- Kendala terkait Perlakuan Perjalanan Dinas DPRD dari Lump Sum menjadi At Cost
Sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12/P/HUM/2024 diantaranya mencabut Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 202 tentang standart harga satuan regional.



Bukti Tindak Lanjut
Terlampir
1. Mengirim Surat ke Inspektorat
2. Jawaban Surat dari Inspektorat

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Jl. Gatot Subroto No 112 Nganjuk Kode Pos 64412
Telpon (0358) 323495 Faxs. (0358) 327183 email: dprdnganjukkab@gmail.com
www. dprdnganjukkab.go.id

Nganjuk, 30 September 2024

Nomor : 900/0830/411.100/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Jawaban tertulis terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 12/HUM/2024. Pasca tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
di
Nganjuk

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 12/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024. Masa jatuh tempo berakhirnya berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 sampai dengan 7 Oktober 2024. Pasca tidak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tersebut kami **mohon diberi arahan, petunjuk dan aturan** terkait pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara lumpsum) yang sudah tidak akan berlaku selama belum ada Regulasi yang mengatur terkait pengganti dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

Demikian permintaan jawaban tertulis ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan disampaikan terimakasih.

Sekretaris DPRD
Kabupaten Nganjuk

ANANG AGUS S,S.Kep, Ns, M. Kes
Pembina /IVa
NIP. 19760804 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk 64412
Telp.(0358) 321196 & 321712 Faks. (0358) 321196
Email : inspektorat@nganjukkab.go.id

Nganjuk, 4 Oktober 2024

Nomor : 700/1240/411.200/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Jawaban terkait Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12/P/HUM/2024 Pasca tidak Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk
di
NGANJUK

Memperhatikan Surat Saudara Nomor 900.1.3/0830/411.100/2024 tanggal 30 September 2024 sebagaimana hal tersebut di atas, dengan ini kami menyampaikan bahwa:

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12/P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:
   a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
   b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
   e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerag; dan
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

   dan karenanya tidak sah atau tidak berlaku untuk umum.
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada BAB VI pasal 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12/P/HUM/2024 tanggal 11 Juni 2024 dikirim kepada Presiden Republik Indonesia selaku pihak yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut tanggal 10 Juli 2024, sehingga apabila sampai batas tanggal 7 Oktober 2024 belum terbit Peraturan Presiden yang baru, maka Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional tidak mempunyai kekuatan hukum dan perjalanan dinas lumpsum (selain uang harian) batal demi hukum.

4. Pimpinan dan Anggota DPRD dapat tetap melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada Standar Satuan Harga Regional yang dibayarkan secara ***at cost*** (selain uang harian) sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
5. Berkaitan dengan :
   - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
   - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
   - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/7/K/411.013/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/224/K/411.013/2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

   Yang ditetapkan dengan menimbang untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dengan tidak sah dan tidak berlakunya P eraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 sebagaimana dimaksud setelah tanggal 7 Oktober 2024, terkait ***pelaksanaan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DRPD*** kami sarankan dibayarkan berpedoman pada :
   - Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
   - Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/224/K/411.013/2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.

Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005198703 1 010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BUKTI TINDAKLANJUT

Koordinasi dengan Perbendaharaan terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Gatot Subroto Nganjuk 64412, Email: dprdnganjuk@gmail.com
Telepon (0358) 323495-Faks 327183
Website: www.dprdnganjukkab.go.id

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Dari : Perencana Ahli Muda
Tanggal : 21 Oktober 2024
Nomor : 000.7.5/ 0886 /411.100/2024
Sifat : Penting
Perihal : Permintaan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan pelaksanaan Evaluasi Internal pada Tribulan III pada Hari Rabu, 16 Oktober 2024, bahwasanya dinyatakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) telah disusun/dicetak sebelum Tanggal 5 di awal bulan guna mendukung Kinerja Perangkat Daerah untuk dikirim pada Bidang Akuntansi BPKAD. Maka kami mohon bantuan saudara untuk sekalian mengirimkan data tersebut pada Perencana Sekretariat DPRD guna mendukung dalam Penyusunan Laporan Capaian Kinerjda dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Per Triwulan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama saudara, kami sampaikan Terimakasih.

Perencana Ahli Muda

FREDIAN DWI PRIYANARKA, S.STP, M.A.P
Penata
NIP. 19900319 201406 1 001

Koordinasi Dengan Bidang Anggaran BPKAD untuk Penyampaian Pergeseran Anggaran antar rincian Obyek dalam Sub Kegiatan





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Gatot Subroto No. Nganjuk Kode Pos 64412
Telp. (0358) 323495 Fax. (0358) 327183 email : dprdnganjukkab@gmail.com
Website : www.dprdnganjukkab.go.id

Nganjuk, 9 Oktober 2024

Nomor : 900/ 0855 /411.100/2024
S i f a t : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pergeseran Belanja

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
di-
N G A N J U K

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3/3434/SJ tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029, memperhatikan Point C. Pelaksanaan Tugas Sabagai Pimpinan Sementara DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, Butir ke 3. Dalam Melaksanakan sebagai Pimpinan Sementara DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota diberikan hak Keuangan selaku anggota DPRD termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas dalam kegiatan koordinasi, konsultasi dan/atau penugasan lainnya selaku Pimpinan DPRD Sementara DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan Bulan Oktober 2024 belum dilaksanakannya Pengambilan sumpah/janji bagi Pimpinan DPRD Kabupaten Nganjuk Masa Jabatan 2024-2029 yang definitif. Sehingga terdapat kekurangan pada belanja tunjangan transportasi DPRD, maka Sekretariat DPRD mengajukan Pergeseran Belanja antar rincian obyek dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN NGANJUK

ANANG AGUS SUSILO,S.Kep.Ns.M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760804 199703 1 004

Tembusan :
Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Nganjuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Program : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan : 4.02.01.2.15 LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD
Sub Kegiatan : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

DPPA Sebelum Pergeseran						DPPA Sesudah Pergeseran						Bertambah/Berkurang
Kode Rekening	Uraian	Korfisien /Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Korfisien /Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
5	BELANJA DAEARAH				**28,282,391,848**	5	BELANJA DAEARAH				**28,282,391,848**	-
5.1	BELANJA OPERASI				**28,282,391,848**	5.1	BELANJA OPERASI				**28,282,391,848**	-
5.1.01	Belanja Pegawai				**28,282,391,848**	5.1.01	Belanja Pegawai				**28,282,391,848**	-
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				**27,889,271,848**	5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				**27,919,271,848**	30,000,000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD				**1,119,860,000**	5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD				**1,119,860,000**	-
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1	Tahun	1,119,860,000	1,119,860,000	5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1	Tahun	1,119,860,000	1,119,860,000	-
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD				**112,568,400**	5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD				**112,568,400**	-
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1	Tahun	112,568,400	112,568,400	5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1	Tahun	112,568,400	112,568,400	-
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD				**132,700,000**	5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD				**132,700,000**	-
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1	Tahun	132,700,000	132,700,000	5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1	Tahun	132,700,000	132,700,000	-
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD				**95,746,770**	5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD				**95,746,770**	-
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	1	Tahun	95,746,770	95,746,770	5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	1	Tahun	95,746,770	95,746,770	-
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD				**1,617,000,000**	5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD				**1,617,000,000**	-
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1	Tahun	1,617,000,000	1,617,000,000	5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1	Tahun	1,617,000,000	1,617,000,000	-
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD				**133,755,200**	5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD				**133,755,200**	-
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1	Tahun	133,755,200	133,755,200	5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1	Tahun	133,755,200	133,755,200	-
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				**85,618,100**	5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD				**65,618,100**	(20,000,000)
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1	Tahun	85,618,100	85,618,100	5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1	Tahun	65,618,100	65,618,100	(20,000,000)
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				**8,820,000,000**	5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD				**8,820,000,000**	-
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	8,820,000,000	8,820,000,000	5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	8,820,000,000	8,820,000,000	-
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD				**1,470,000,000**	5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD				**1,470,000,000**	-
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1	Tahun	1,470,000,000	1,470,000,000	5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1	Tahun	1,470,000,000	1,470,000,000	-
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				**115,084,148**	5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD				**115,084,148**	-
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	115,084,148	115,084,148	5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Tahun	115,084,148	115,084,148	-
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD				**461,230**	5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD				**461,230**	-
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1	Tahun	461,230	461,230	5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1	Tahun	461,230	461,230	-
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				**8,169,413,000**	5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD				**8,109,413,000**	(60,000,000)
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1	Tahun	106,805,000	106,805,000	5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1	Tahun	106,805,000	106,805,000	-
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1	Tahun	5,400,000	5,400,000	5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1	Tahun	5,400,000	5,400,000	-
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1	Tahun	11,100,000	11,100,000	5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1	Tahun	11,100,000	11,100,000	-
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1	Tahun	8,046,108,000	8,046,108,000	5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1	Tahun	7,986,108,000	7,986,108,000	(60,000,000)
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD				**5,560,000,000**	5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD				**5,670,000,000**	110,000,000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1	Tahun	5,560,000,000	5,560,000,000	5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1	Tahun	5,670,000,000	5,670,000,000	110,000,000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				**457,065,000**	5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				**457,065,000**	-

DPPA Sebelum Pergeseran						DPPA Sesudah Pergeseran						Bertambah/Berkurang
Kode Rekening	Uraian	Korfisien /Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Kode Rekening	Uraian	Korfisien /Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				457,065,000	5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD				457,065,000	-
	Belanja Uang Jasa Pengabdian Ketua DPRD	1	Orang/ Tahun	12,600,000	12,600,000		Belanja Uang Jasa Pengabdian Ketua DPRD	1	Orang/ Tahun	12,600,000	12,600,000	-
	Belanja Uang Jasa Pengabdian Wakil Ketua DPRD	3	Orang/ Tahun	10,080,000	30,240,000		Belanja Uang Jasa Pengabdian Wakil Ketua DPRD	3	Orang/ Tahun	10,080,000	30,240,000	-
	Belanja Uang Jasa Pengabdian Anggota DPRD	3	Orang/ Tahun	4,725,000	14,175,000		Belanja Uang Jasa Pengabdian Anggota DPRD	3	Orang/ Tahun	4,725,000	14,175,000	-
		2	Orang/ Tahun	6,300,000	12,600,000			2	Orang/ Tahun	6,300,000	12,600,000	-
		41	Orang/ Tahun	9,450,000	387,450,000			41	Orang/ Tahun	9,450,000	387,450,000	-
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				**393,120,000**	5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				**363,120,000**	(30,000,000)
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD				**393,120,000**	5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD				**363,120,000**	(30,000,000)
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1	Tahun	393,120,000	393,120,000	5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1	Tahun	363,120,000	363,120,000	(30,000,000)

Penyampaian Persentasi pada TAPD







Telah di Entry pada SIPD Penganggaran

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA-BELANJA SKPD
Pemerintahan Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan	: 4.02 SEKRETARIAT DPRD
Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi	: 4.02.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat DPRD
Program	: 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kegiatan	: 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	-
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 28.282.391.848,00
Alokasi 2025	: Rp. 0,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan					
Sebelum			Sesudah		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	80,25 Nilai 83 Nilai	Capaian Program	Nilai SAKIP Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Bagian Program dan Keuangan	80,25 Nilai 83 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.282.391.848,00	Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 28.282.391.848,00
Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan	Keluaran	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang/Bulan
Hasil	-	-	Hasil	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Sub Kegiatan	: 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi	: Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	:

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
5	**BELANJA DAERAH**					**28.282.391.848,00**					**28.282.391.848,00**	**0,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**28.282.391.848,00**					**28.282.391.848,00**	**0,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**28.282.391.848,00**					**28.282.391.848,00**	**0,00**
5.1.01.04	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**					**27.889.271.848,00**					**27.919.271.848,00**	**30.000.000,00**
5.1.01.04.01	**Belanja Uang Representasi DPRD**					**1.119.860.000,00**					**1.119.860.000,00**	**0,00**
5.1.01.04.01.0001	**Belanja Uang Representasi DPRD**					**1.119.860.000,00**					**1.119.860.000,00**	**0,00**
	[#] Gaji dan Tunjangan DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**1.119.860.000,00**					**1.119.860.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Uang Representasi DPRD					**1.119.860.000,00**					**1.119.860.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Representasi DPRD	1 Tahun	Tahun	1.119.860.000,00	-	1.119.860.000,00	1 Tahun	Tahun	1.119.860.000,00	-	1.119.860.000,00	0,00
5.1.01.04.02	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**					**112.568.400,00**					**112.568.400,00**	**0,00**
5.1.01.04.02.0001	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**					**112.568.400,00**					**112.568.400,00**	**0,00**
	[#] Belanja Tunjangan Keluarga DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**112.568.400,00**					**112.568.400,00**	**0,00**
	[-] Belanja Tunjangan Keluarga DPRD					**112.568.400,00**					**112.568.400,00**	**0,00**
	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	1 Tahun	Tahun	112.568.400,00	-	112.568.400,00	1 Tahun	Tahun	112.568.400,00	-	112.568.400,00	0,00
5.1.01.04.03	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**					**132.700.000,00**					**132.700.000,00**	**0,00**
5.1.01.04.03.0001	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**					**132.700.000,00**					**132.700.000,00**	**0,00**

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Tunjangan Beras DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					132.700.000,00					132.700.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Beras DPRD					132.700.000,00					132.700.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Beras DPRD	1 Tahun	Tahun	132.700.000,00	-	132.700.000,00	1 Tahun	Tahun	132.700.000,00	-	132.700.000,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD					95.746.770,00					95.746.770,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD					95.746.770,00					95.746.770,00	0,00
	[#] Belanja Uang Paket Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					95.746.770,00					95.746.770,00	0,00
	[-] Belanja Uang Paket DPRD					95.746.770,00					95.746.770,00	0,00
	Belanja Uang Paket DPRD	1 Tahun	Tahun	95.746.770,00	-	95.746.770,00	1 Tahun	Tahun	95.746.770,00	-	95.746.770,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.617.000.000,00					1.617.000.000,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.617.000.000,00					1.617.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.617.000.000,00					1.617.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Jabatan DPRD					1.617.000.000,00					1.617.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 Tahun	Tahun	1.617.000.000,00	-	1.617.000.000,00	1 Tahun	Tahun	1.617.000.000,00	-	1.617.000.000,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					133.755.200,00					133.755.200,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					133.755.200,00					133.755.200,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					133.755.200,00					133.755.200,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD					133.755.200,00					133.755.200,00	0,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	1 Tahun	Tahun	133.755.200,00	-	133.755.200,00	1 Tahun	Tahun	133.755.200,00	-	133.755.200,00	0,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					85.618.100,00					65.618.100,00	-20.000.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					85.618.100,00					65.618.100,00	-20.000.000,00
	[#] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					85.618.100,00					65.618.100,00	-20.000.000,00
	[-] Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD					85.618.100,00					65.618.100,00	-20.000.000,00
	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	1 Tahun	Tahun	85.618.100,00	-	85.618.100,00	1 Tahun	Tahun	65.618.100,00	-	65.618.100,00	-20.000.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					8.820.000.000,00					8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					8.820.000.000,00					8.820.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					8.820.000.000,00					8.820.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD					8.820.000.000,00					8.820.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	8.820.000.000,00	-	8.820.000.000,00	1 Tahun	Tahun	8.820.000.000,00	-	8.820.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.470.000.000,00					1.470.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.470.000.000,00					1.470.000.000,00	0,00
	[#] Belanja Tunjangan Reses DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					1.470.000.000,00					1.470.000.000,00	0,00
	[-] Belanja Tunjangan Reses DPRD					1.470.000.000,00					1.470.000.000,00	0,00
	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1 Tahun	Tahun	1.470.000.000,00	-	1.470.000.000,00	1 Tahun	Tahun	1.470.000.000,00	-	1.470.000.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					115.084.148,00					115.084.148,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					115.084.148,00					115.084.148,00	0,00
	[#] Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					115.084.148,00					115.084.148,00	0,00
	[-] Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD					115.084.148,00					115.084.148,00	0,00
	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Tahun	Tahun	115.084.148,00	-	115.084.148,00	1 Tahun	Tahun	115.084.148,00	-	115.084.148,00	0,00
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					461.230,00					461.230,00	0,00
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD					461.230,00					461.230,00	0,00
	[#] Belanja Pembulatan Gaji DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					461.230,00					461.230,00	0,00
	[-] Belanja Pembulatan Gaji DPRD					461.230,00					461.230,00	0,00
	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	1 Tahun	Tahun	461.230,00	-	461.230,00	1 Tahun	Tahun	461.230,00	-	461.230,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD					8.169.413.000,00					8.109.413.000,00	-60.000.000,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					106.805.000,00					106.805.000,00	0,00
	[#] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					106.805.000,00					106.805.000,00	0,00
	[-] Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD					106.805.000,00					106.805.000,00	0,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	1 Tahun	Tahun	106.805.000,00	-	106.805.000,00	1 Tahun	Tahun	106.805.000,00	-	106.805.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[#] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	[-] Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD					5.400.000,00					5.400.000,00	0,00
	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1 Tahun	Tahun	5.400.000,00	-	5.400.000,00	1 Tahun	Tahun	5.400.000,00	-	5.400.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD					11.100.000,00					11.100.000,00	0,00

Rincian Anggaran Belanja Sub Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan Sebelum					Rincian Perhitungan Sesudah					Bertambah / (Berkurang) (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	Koefisien	Satuan	Harga (Rp)	PPN	Jumlah (Rp)	
	[#] Belanja Jaminan Kematian DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**11.100.000,00**					**11.100.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Jaminan Kematian DPRD					**11.100.000,00**					**11.100.000,00**	**0,00**
	Belanja Jaminan Kematian DPRD	1 Tahun	Tahun	11.100.000,00	-	11.100.000,00	1 Tahun	Tahun	11.100.000,00	-	11.100.000,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	**Belanja Tunjangan Perumahan DPRD**					**8.046.108.000,00**					**7.986.108.000,00**	**-60.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Perumahan DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**8.046.108.000,00**					**7.986.108.000,00**	**-60.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Perumahan DPRD					**8.046.108.000,00**					**7.986.108.000,00**	**-60.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1 Tahun	Tahun	8.046.108.000,00	-	8.046.108.000,00	1 Tahun	Tahun	7.986.108.000,00	-	7.986.108.000,00	-60.000.000,00
5.1.01.04.13	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**					**5.560.000.000,00**					**5.670.000.000,00**	**110.000.000,00**
5.1.01.04.13.0001	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**					**5.560.000.000,00**					**5.670.000.000,00**	**110.000.000,00**
	[#] Belanja Tunjangan Transportasi DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**5.560.000.000,00**					**5.670.000.000,00**	**110.000.000,00**
	[-] Belanja Tunjangan Transportasi DPRD					**5.560.000.000,00**					**5.670.000.000,00**	**110.000.000,00**
	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	1 Tahun	Tahun	5.560.000.000,00	-	5.560.000.000,00	1 Tahun	Tahun	5.670.000.000,00	-	5.670.000.000,00	110.000.000,00
5.1.01.04.14	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**					**457.065.000,00**					**457.065.000,00**	**0,00**
5.1.01.04.14.0001	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**					**457.065.000,00**					**457.065.000,00**	**0,00**
	[#] Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**457.065.000,00**					**457.065.000,00**	**0,00**
	[-] Belanja Uang Jasa Pengabdian Anggota DPRD					**414.225.000,00**					**414.225.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	2 Orang / Tahun	Orang / Tahun	6.300.000,00	-	12.600.000,00	2 Orang / Tahun	Orang / Tahun	6.300.000,00	-	12.600.000,00	0,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3 Orang / Tahun	Orang / Tahun	4.725.000,00	-	14.175.000,00	3 Orang / Tahun	Orang / Tahun	4.725.000,00	-	14.175.000,00	0,00
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	41 Orang / Tahun	Orang / Tahun	9.450.000,00	-	387.450.000,00	41 Orang / Tahun	Orang / Tahun	9.450.000,00	-	387.450.000,00	0,00
	[-] Belanja Uang Jasa Pengabdian Ketua DPRD					**12.600.000,00**					**12.600.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	1 Orang / Tahun	Orang / Tahun	12.600.000,00	-	12.600.000,00	1 Orang / Tahun	Orang / Tahun	12.600.000,00	-	12.600.000,00	0,00
	[-] Belanja Uang Jasa Pengabdian Wakil Ketua DPRD					**30.240.000,00**					**30.240.000,00**	**0,00**
	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3 Orang / Tahun	Orang / Tahun	10.080.000,00	-	30.240.000,00	3 Orang / Tahun	Orang / Tahun	10.080.000,00	-	30.240.000,00	0,00
5.1.01.06	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**					**393.120.000,00**					**363.120.000,00**	**-30.000.000,00**
5.1.01.06.01	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**					**393.120.000,00**					**363.120.000,00**	**-30.000.000,00**
5.1.01.06.01.0001	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**					**393.120.000,00**					**363.120.000,00**	**-30.000.000,00**
	[#] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum**					**393.120.000,00**					**363.120.000,00**	**-30.000.000,00**
	[-] Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD					**393.120.000,00**					**363.120.000,00**	**-30.000.000,00**
	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1 Tahun	Tahun	393.120.000,00	-	393.120.000,00	1 Tahun	Tahun	363.120.000,00	-	363.120.000,00	-30.000.000,00
	Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sebelum :					**28.282.391.848,00**	**Jumlah Anggaran Sub Kegiatan Sesudah :**				**28.282.391.848,00**	**0,00**

Kab. Nganjuk,.....
Sekretaris DPRD

Anang Agus Susilo, S.Kep.Ns. M. Kes
NIP. 197608041997031004

Pembahasan	:	
Tanggal	:	
Catatan	:	
1.		
2.		
Dst		

Tim Anggaran Pemerintahan Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. NUR SOLEKAN, M.Si	196612271986021001	Ketua	
2	PURWO BUJONO, S. Hut	196709121997031004	Wakil Ketua	
3	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M. Si	196805111992022001	Sekretaris	